

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

UU NO.20 Tahun 2003 Pasal (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional, dengan jelas mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU diatas, maka kepada setiap pemimpin dalam bidang pendidikan dituntut kemampuan manajerial yang baik agar mampu mengelola segala sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.

Keberhasilan seorang kepala sekolah dalam memimpin sekolah sebagai unit kerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah mutu penataan administrasi perkantoran atau yang lazim disebut dengan ketatausahaan yang berlangsung di sekolah tersebut. Semakin baik manajemen tata usaha dalam suatu sekolah maka semakin efektiflah kepemimpinan kepala sekolah tersebut.

Pekerjaan ketatausahaan dalam suatu perkantoran mengurus segala bentuk surat-menyurat yang berlangsung dalam suatu sekolah. Menerima surat masuk, mengagendakan surat, memberikan nomor surat, bahkan sampai membalas dan menyimpan atau mengarsipkan surat sesuai dengan keperluannya.

Kinerja ketatausahaan saat ini belum menunjukkan hasil yang begitu menggembirakan sesuai dengan yang diharapkan. Fenomena ini dapat kita amati dalam beberapa aktifitas, seperti: (1) Proses pembuatan surat yang lamban, (2) Birokrasi yang berbelit-belit, (3) Sulitnya mencari data/file yang diinginkan, (4) Lemahnya sistem pengarsipan surat, (5) Rendahnya mutu (*performance*) surat yang dihasilkan, (6) Rendahnya semangat kerja pegawai, (7) Sikap arogansi pegawai tata usaha terhadap guru atau warga sekolah lainnya.

Dalam surat khabar harian Analisa yang ditulis oleh Hesty On, mengatakan bahwa “ pelayanan publik adalah merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, bila kita ingin jujur kenyataan menunjukkan bahwa pelayanan ini masih saja berada pada titik yang *sangat memprihatinkan* atau sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Hal ini dapat kita amati dengan jelas dari tingginya budaya bolos para abdi negara tersebut sehingga menyebabkan kualitas pekerjaan menjadi sangat rendah. Ironisnya, sudah kualitas kinerjanya begitu rendah justru ditambah lagi dengan budaya korupsinya yang semakin tinggi. Sementara berdasarkan data statistik, ternyata hampir di semua instansi dan dinas memiliki pegawai yang begitu jarang masuk kerja. Kalaupun dalam suatu instansi , para pegawai hadir seratus persen , barangkali hanya akan kita temui pada awal bulan yaitu pada saat gaji” (Analisa, 18 September 2007 halaman 28, 32).

Fenomena di atas sangat mempengaruhi kinerja kepala sekolah sebagai seorang *leader* untuk mengambil keputusan, sekaligus menghambat sikap inovatif seorang pemimpin dalam memajukan sekolah. Maka bila hal ini dibiarkan terus menerus tentu akan menghambat pencapaian tujuan yang diharapkan .

Perhatian pemerintah maupun para pengambil kebijakan di tingkat pusat atau di tingkat daerah maupun pada tingkat mikro di sekolah selama ini hanya terfokus pada peningkatan kualitas kinerja guru sebagai prioritas utama, bahkan sering sampai mengabaikan tugas dan fungsi pegawai tata usaha sekolah sebagai mitra kerja guru di sekolah.

Setiap pengambil kebijakan hendaknya memperhatikan bahwa sekalipun keberlangsungan proses pengajaran yang menjadi sasaran utama dalam pendidikan tetapi bukan berarti kegiatan administrasi bisa diabaikan. Manajemen tata usaha sekolah dapat menjadi penghambat pencapaian tujuan pendidikan bila tidak dikelola dengan seimbang dan serasi. Tetapi bila seluruh aspek tersebut dikelola dengan baik maka akan terbentuk suatu pola kerja yang terintegrasi dalam mengacu pada arah yang sama yakni terselenggaranya proses pengajaran (*instructional process*) dengan tertib, lancar dan ekonomis yang pada gilirannya memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah (Burhanuddin, 1994: 40).

Kantor Tata Usaha di tingkat SMP/SMA dikepalai oleh seorang KTU dengan eselon V.a. Akan tetapi setelah otonomi daerah, pemerintah melalui PP No.8 Tahun 2003 menghapus eselon V dari struktur pemerintahan daerah, akibatnya jabatan KTU di SMP/SMA menjadi vakum.

Menyikapi penghapusan jabatan KTU tersebut, maka kepala sekolah sebagai *Top-leader* di sekolah mencoba menerapkan berbagai kebijakan, diantaranya adalah menempatkan PKS-PKS sebagai kordinator tugas-tugas ketatausahaan. PKS 1 mengkordinasikan TU urusan kesiswaan, PKS 2 mengkordinasikan TU urusan kepegawaian & perlengkapan dan PKS 4 mengkordinasikan TU urusan keuangan.

Pada prakteknya di lapangan ternyata kebijakan kepala sekolah tersebut justru mendatangkan masalah baru, antara lain: (1) Menurunnya semangat kerja pegawai karena karir mereka menjadi tidak jelas, (2) Tingginya intervensi PKS ke dalam tugas-tugas ketatausahaan yang sifatnya administratif, (3) Hilangnya otoritas dan inovasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Selain fenomena yang diutarakan di atas, hal lain yang nampak penulis amati dalam kinerja ketatausahaan adalah paradigma atau pola pikir pegawai tata usaha yang sering keliru dalam memahami tupoksinya. Para pegawai kurang menyadari bahwa fungsi utama tata usaha di sekolah adalah memberikan pelayanan terhadap setiap komponen dalam sistem persekolahan, baik terhadap guru, kepala sekolah, siswa maupun sesama pegawai tata usaha itu sendiri . Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gunawan bahwa tugas utama tata usaha sekolah adalah *mendukung atau menunjang* tugas pendidik dalam memberhasikan program pengajaran disekolah (Gunawan, 1996: 71)

Pegawai tata usaha sering menempatkan dirinya sebagai bagian yang terpisah dari sub sistem lainnya dalam sistem sekolah atau berada di luar sistem, maka kadang-kadang muncul sikap arogansi pegawai terhadap guru atau sebaliknya. Bila demikian yang terjadi maka pegawai tata usaha tentu tidak akan dapat memberikan *kontribusi positif* terhadap peningkatan kualitas layanan yang diberikan oleh kepala sekolah dalam mencapai kemajuan pendidikan di sekolahnya

Dalam penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa fenomena-fenomena diatas terjadi di SMA Negeri 1 Pancurbatu, oleh sebab itu penulis ingin mengangkat masalah ini menjadi sebuah judul penelitian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah: “ Manajemen tata usaha sekolah di SMA Negeri 1 Pancurbatu ”.

C. Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana manajemen tata usaha sekolah di SMA Negeri 1 Pancurbatu ”. Untuk lebih spesifiknya penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen tata usaha kesiswaan di SMA Negeri 1 Pancurbatu
2. Bagaimana manajemen tata usaha kepegawaian di SMA Negeri 1 Pancurbatu
3. Bagaimana manajemen tata usaha perlengkapan di SMA Negeri 1 Pancurbatu
4. Bagaimana manajemen tata usaha keuangan di SMA Negeri 1 Pancurbatu

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen tata usaha sekolah di SMA Negeri 1 Pancurbatu.

Secara khusus bertujuan untuk mengetahui :

1. Manajemen tata usaha kesiswaan di SMA Negeri 1 Pancurbatu
2. Manajemen tata usaha kepegawaian di SMA Negeri 1 Pancurbatu
3. Manajemen tata usaha perlengkapan di SMA Negeri 1 Pancurbatu
4. Manajemen tata usaha keuangan di SMA Negeri 1 Pancurbatu

Selanjutnya setelah mengetahui manajemen tata usaha di SMA Negeri 1 Pancurbatu sesuai dengan yang diutarakan di atas, maka penulis akan mencoba merumuskan model manajemen tata usaha sekolah yang ideal untuk dilakukan pada tingkat satuan pendidikan SMA Negeri.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk pengembangan ilmu dan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan masalah manajemen tata usaha sekolah

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai

- a. Bahan pertimbangan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang sebagai pihak pengambil kebijakan tentang manajemen tata usaha sekolah.
- b. Bahan masukan kepada kepala-kepala sekolah SMA Negeri sebagai seorang administrator disekolah, tentang manajemen tata usaha sekolah
- c. Bahan masukan kepada seluruh staf pegawai tata usaha sekolah sebagai penyelenggara tugas ketatausahaan di sekolah